



Legis
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

2025-2029

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS



BerAKHLAK 
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang yang disusun secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Diharapkan dokumen ini akan menjadi acuan yang komprehensif bagi seluruh komponen Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung kinerja lembaga legislatif daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dan menjadi landasan kuat dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, Juni 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang

DODORIKUS, AP., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741011 199412 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Susunan Organisasi ..	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	24
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	31
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	35



BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	45
4.2 Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.....	57
BAB V : PENUTUP	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	15
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	17
Tabel 2.4	Daftar Aset Perangkat Daerah	18
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Renstra Sebelumnya	21
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Renstra Sebelumnya	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	33
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	38
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	45
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	58
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode 2025-2029 disusun sebagai instrumen perencanaan yang mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah. Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan penting:

Dinamika perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk perkembangan demografi, sosial-ekonomi, dan politik di Kabupaten Bengkayang yang memerlukan adaptasi dalam pelayanan administrasi dan fasilitasi DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, bahwa tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.



Dalam penyelenggaraan tugas pokok di atas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- f. Pemberian pelayanan administratif dan ketatausahaan kepada anggota DPRD;
- g. Pengelolaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

Dalam era pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang membutuhkan perencanaan yang tepat dan terarah sebagai landasan untuk mewujudkan kinerja aparatur yang handal. Keberhasilan penyelenggaraan administrasi yang efektif bergantung pada kemampuan institusi dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima.

Perencanaan sebagai proses penetapan pilihan dalam mencapai tujuan pembangunan harus didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur mulai dari tahapan penyusunan hingga evaluasi, dengan memperhatikan aspek pengendalian yang berkelanjutan..

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang 2025-2029 hadir sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi berdasarkan kondisi faktual,



potensi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Dokumen ini dirancang dengan orientasi hasil yang terukur selama kurun waktu lima tahun, bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang, dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Melalui pendekatan strategis ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu mengoptimalkan arah perkembangan dan peningkatan kinerja, serta menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan dasar-dasar hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan



- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berserta pedoman lampirannya;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 6; Noreg. 6-227/2024);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kerja selama 5 tahun ke depan, menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan visi-misi pembangunan daerah, menciptakan kerangka kerja sistematis untuk implementasi program, dan memenuhi kewajiban administratif dalam sistem perencanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif dan fasilitasi kepada DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Sekretariat DPRD
4. Memastikan sinkronisasi program kerja dengan rencana pembangunan daerah dan menyediakan tolok ukur evaluasi kinerja.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 1.2 Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2 Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. **Fungsi Administrasi** : Memberikan dukungan teknis kepada anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ;
- b. **Fungsi Dukungan Teknis**: Memberikan dukungan teknis kepada anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. **Fungsi Pelayanan**: Menyediakan pelayanan administrasi dan teknis kepada anggota DPRD serta pihak terkait lainnya.
- d. **Fungsi Koordinasi**: Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi lain dalam rangka mendukung kelancaran tugas DPRD.
- e. **Fungsi Pelaporan**: Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretariat DPRD.



2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2022 Bengkulu Tengah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga
3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari Bidang Kesejahteraan dan Informasi Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi
4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari
 - a. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

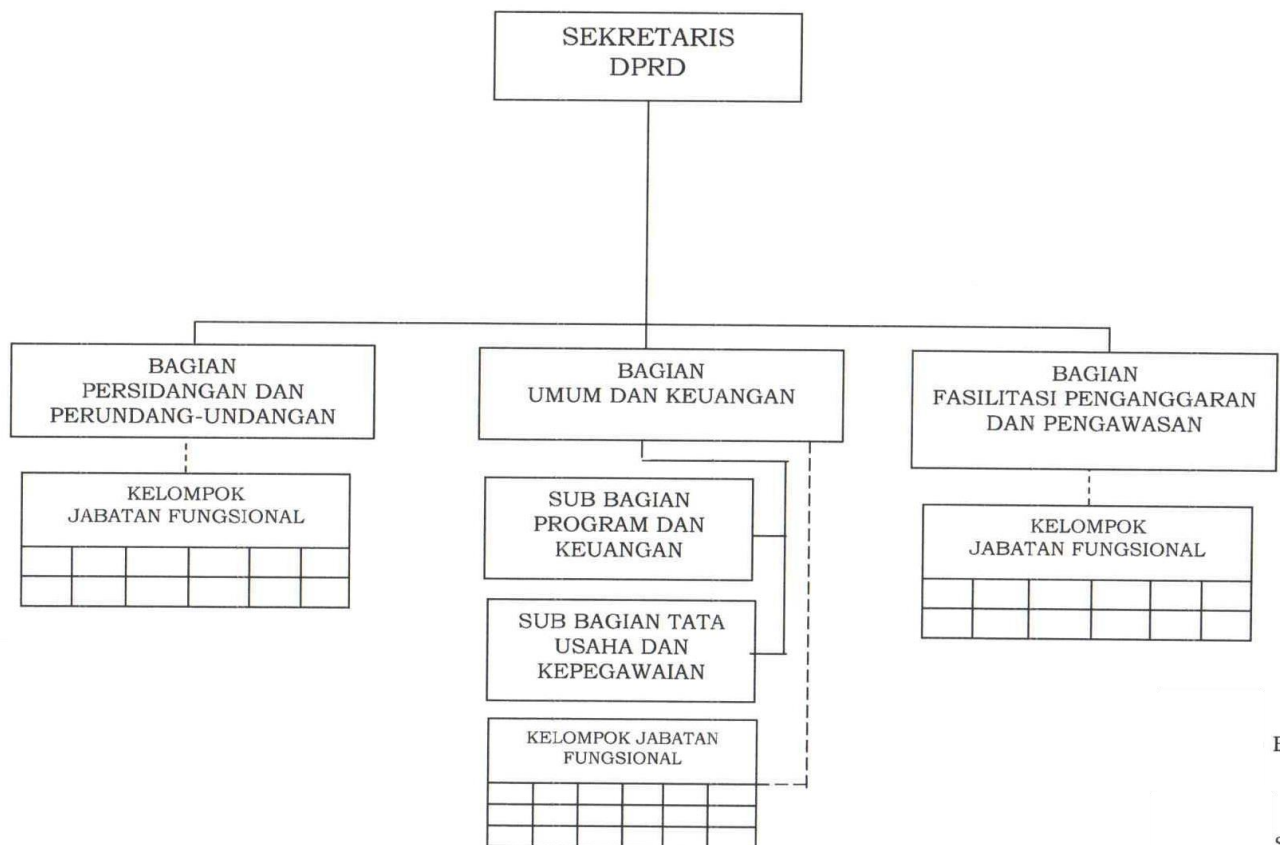
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut:



Struktur Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang pelaksanaan Program dan kegiatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah didukung jumlah aparatur sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, terdiri dari 28 ASN, dan 20 Tenaga Honorer. Berdasarkan komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, digambarkan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2024

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28	58.33
2	Tenaga Honorer	20	41.67
Jumlah		48	100,00

Komposisi jabatan pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Jabatan Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun
2024

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretaris	-	-	-	1	-
2	Kepala Bagian	-	-	-	2	2
3	Kasubbag / Kasi	-	-	1	1	2
4	Jabatan Fungsional	-	-	3	1	4
5	Pelaksana PNS	-	10	9	-	19
Jumlah		-	10	13	5	28



Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Jabatan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2024

No.	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D3	S1/D-4	S2	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bagian	-	-	1	1	2
4	Kasubbag	-	-	1	1	2
5	Pelaksana PNS	12	5	2	-	19
6	Fungsional	-	-	3	1	4
7	Tenaga Honorer	13	2	5	-	20
Jumlah		25	7	12	4	48

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sebagai alat pendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4
Daftar Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap	
	- Tanah	311.025.000
	- Peralatan Mesin	7.952.021.321
	- Gedung dan Bangunan	8.766.321.010
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	263.510.600
	- Akumulasi Penyusutan	(9.747.221.449.09)
2	Aset Lainnya	
	- Aset Lain-Lain	2.009.078.971
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Jumlah		9.554.735.452.9



2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penunjang bagi kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD secara konsisten memberikan dukungan administratif dan teknis kepada anggota dewan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Peningkatan kinerja pelayanan terlihat dari keberhasilan Sekretariat dalam memfasilitasi rapat-rapat dewan, kunjungan kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.

Dalam aspek pengelolaan administrasi kesekretariatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang telah mengimplementasikan sistem pelayanan yang efektif dan efisien. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, dan dokumentasi kegiatan DPRD dilaksanakan dengan standar operasional yang jelas dan terukur. Penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi juga semakin ditingkatkan, terlihat dari digitalisasi dokumen dan penggunaan aplikasi manajemen perkantoran yang mempermudah akses informasi bagi anggota dewan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada aspek pengelolaan keuangan dan aset, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan telah mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, sehingga meminimalisir risiko penyimpangan dan mendukung terwujudnya tata kelola yang baik.



Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang juga telah memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan. Sekretariat berperan aktif dalam mengelola aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, baik melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, maupun saluran komunikasi lainnya. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan sistem informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap kegiatan DPRD, serta peningkatan fasilitas fisik untuk mendukung fungsi representasi dewan, seperti ruang aspirasi dan pusat informasi yang memadai.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



TABEL 2.5
TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja								
			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	1. Ratio Perda yang ditetapkan	80	75	80	80	75.25	80	80	78.00	80
3.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan daerah	1. Nilai SAKIP OPD	Na	Na	Na	B	CC	58.75	B	B	61.75

Ket : *T = Target*

R= Realisasi

C= Capaian



TABEL 2.6
TABEL REALISASI ANGGARAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

No	NAMA/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN TAHUN KE			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,443,425	7,500,000	13,368,000	7,500,000	17,843,825	6,322,000	13,302,000	7,500,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11,240,925	7,500,000	5,070,000	7,500,000	11,018,625	7,425,000	5,070,000	7,500,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,230,950	25,228,500	10,876,000	7,500,000	5,174,850	25,154,500	10,856,400	7,345,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,835,800	7,500,000	8,574,000	7,500,000	4,770,100	7,258,000	8,565,400	7,375,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6,405,700	22,860,800	10,436,000	7,500,000	6,335,700	19,810,000	10,428,000	7,333,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,840,600	7,500,000	5,144,000	7,500,000	6,492,700	7,354,000	5,144,000	7,375,000
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,384,073,826	2,724,258,077	2,998,757,228	3,076,578,874	2,731,825,490	2,610,333,083	2,829,833,328	2,847,745,764
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,588,725	17,139,000	4,689,000	7,500,000	13,307,125	16,861,000	4,689,000	7,500,000
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	7,500,000	-	-	-	7,500,000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,204,875	40,043,000	27,711,800	15,000,000	9,615,975	38,874,800	27,691,800	15,000,000
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,732,000	10,000,000	8,359,600	7,500,000	8,183,000	9,830,700	8,106,600	7,429,500
13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10,240,000	10,240,000	12,970,000	7,500,000	9,531,200	9,234,950	8,644,400	7,487,300
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,117,000	10,000,000	13,662,000	7,499,500	7,172,400	9,807,500	13,217,650	7,496,000
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,732,000	10,000,000	10,000,000	7,500,000	2,912,000	9,258,000	8,982,200	7,498,500
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150,000,000	-	-	54,000,000	120,800,000	-	-	47,131,499
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,784,000	165,480,000	199,837,000	73,031,145	45,330,800	124,344,860	198,007,611	72,463,700
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	7,382,000	-	-	-	32,000	-
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34,545,200	18,020,000	19,998,000	38,000,000	34,540,100	17,885,000	19,966,000	38,000,000
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249,999,400	215,806,800	170,524,400	100,568,000	249,838,400	215,774,200	170,465,800	100,567,000
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,000,000	10,000,000	10,000,000	-	1,045,000	9,950,000	8,000,000	-
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	675,094,750	691,860,000	644,309,100	15,000,280	654,628,500	688,128,000	635,836,300	14,880,280



**Rencana Strategi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**



No	NAMA/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN TAHUN KE			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	345,761,300	219,641,000	114,705,800	47,871,000	345,499,150	219,572,250	112,482,000	47,871,000
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,250,000	17,508,800	20,390,000	24,065,000	29,100,000	17,508,000	17,100,300	24,038,000
25	Penyediaan Bahan/Material	-							
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-							
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457,848,000	505,684,000	361,452,000	249,915,000	455,829,619	505,679,130	360,955,470	249,884,903
28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	10,000,000	9,868,000	3,860,000		9,987,200	9,868,000	3,860,000
29	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	520,799,900				9,531,200			
30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			34,800,000				34,800,000
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-							
32	Pengadaan Mebel	30,770,000	122,300,000	37,555,000		20,376,000	121,500,000	37,251,000	
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,999,850	812,872,878	17,827,000		47,555,460	771,295,900	6,800,000	
34	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-							
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,044,950		18,489,000	99,229,800	12,548,000		16,312,000	98,740,525
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			25,050,000				23,830,000
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,995,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	19,900,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276,846,548	484,549,680	329,415,000	287,200,000	154,807,416	385,770,987	328,945,584	281,325,118
39	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,389,000	83,212,000			65,338,900	83,012,000		
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864,248,627	1,105,049,380	810,677,380	703,232,688	821,117,778	984,341,269	770,630,359	698,647,640
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	703,501,750	735,008,500	686,218,900	373,300,900	660,908,192	706,080,500	672,170,549	363,037,196
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				201,281,400				200,019,325
43	Pemeliharaan Mebel								
44	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,740,000	67,000,000	109,175,200	80,720,000	53,787,250	62,411,348	105,580,800	75,228,000
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,006,826,100	105,180,000		59,004,600	1,002,884,500	73,707,250		57,364,000



**Rencana Strategi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**



No	NAMA/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN TAHUN KE			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,940,000	51,919,000			12,762,500	51,385,000		
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			62,930,000	59,004,600			57,625,000	57,364,000
48	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15,481,214,012	14,427,050,918	14,846,917,874	14,775,870,261	14,271,221,626	14,302,219,105	14,810,256,820	14,629,215,529
49	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	210,105,050	294,678,800	298,692,000	188,790,580	209,878,800	288,773,900	298,569,000	188,228,980
50	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				403,000,000				402,410,775
51	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD								
52	Fasilitasi Fraksi DPRD								
53	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	690,809,700	348,385,500	264,144,000	396,319,000	689,768,250	346,593,750	240,899,850	370,196,900
54	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	419,239,850	458,671,000	445,039,000	414,160,000	409,669,350	457,614,000	406,755,600	413,144,000
55	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	593,055,200	345,786,000	541,879,600	515,185,500	592,513,582	326,570,978	526,890,471	513,356,925
56	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	505,233,000	465,246,000	732,693,000	1,256,338,000	503,949,343	464,754,006	724,528,484	1,248,730,003
57	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	321,333,850	98,620,000	117,500,000	304,482,000	319,828,800	98,516,400	116,191,560	294,066,194
58	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	123,745,000	123,410,100	723,000	150,000,000	117,729,800	13,178,900	723,000	145,483,000
59	Penyusunan Tata Tertib DPRD	9,035,900	32,444,900	4,905,000	367,910,000	9,035,900	32,063,400	2,430,000	367,754,164
60	Pembahasan KUA dan PPAS	253,385,700	208,729,400	42,227,000	131,087,000	164,909,552	208,342,990	35,700,000	130,980,925
61	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	245,740,000	194,994,000	58,100,000	179,097,000	166,855,928	194,289,930	57,776,400	177,000,424
62	Pembahasan APBD	255,462,000	285,795,000	355,728,000	505,415,000	250,115,975	284,683,738	353,073,866	505,368,285
63	Pembahasan APBD Perubahan	249,999,500	345,304,000	213,473,000	507,694,920	235,511,852	344,869,388	209,837,320	507,616,372
64	Pembahasan Laporan Semester	20,146,000	49,820,000	24,230,700	115,567,700	6,327,800	49,495,551	22,131,000	114,838,440
65	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	438,948,000	201,812,000	462,167,700	393,749,000	343,984,650	201,347,685	461,493,557	392,978,052
66	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	150,838,400	397,876,000	383,070,000	216,448,040	147,295,964	397,689,007	382,247,725	214,440,050
67	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	169,375,000	413,432,000	405,662,000	201,402,720	167,547,400	412,903,472	402,634,137	199,962,775
68	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	398,919,800	383,756,000	365,907,000	216,448,080	396,750,761	383,674,363	364,355,888	213,284,566
69	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	249,770,000	321,408,000	291,042,000	204,594,880	246,769,350	321,149,493	289,608,458	202,517,725



**Rencana Strategi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**



No	NAMA/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN TAHUN KE			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
70	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	189,240,000	373,868,000	214,340,000	362,624,000	188,163,100	373,145,171	211,273,200	362,605,450
71	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	189,440,000	197,890,000	21,840,000	50,000,000	187,427,889	196,666,118	21,308,086	48,771,800
72	Pengawasan Penggunaan Anggaran	189,995,000	187,800,000	139,450,000	223,547,880	188,037,011	187,538,518	134,510,134	222,804,113
73	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				260,629,000				259,945,424
74	Orientasi DPRD				1,574,338,040				1,573,492,274
75	Pendalaman Tugas DPRD	1,742,350,000	1,227,650,000	1,754,205,000	344,905,090	1,040,700,373	1,111,222,697	1,661,665,398	343,761,171
76	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								
77	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210,790,150	220,000,000	219,658,320	219,277,152	201,835,500	195,882,800	210,851,094	214,171,328
78	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	219,999,800	141,375,000	153,100,000	16,204,000	172,024,000	141,004,000	150,279,760	15,026,000
79	Penyusunan Program Kerja DPRD	191,970,675	106,116,000	190,893,000	59,999,800	188,583,550	105,652,900	159,669,586	58,674,900
80	Publikasi Dokumentasi DPRD	530,000,000	504,018,000	452,314,000	316,115,320	528,017,872	503,915,900	445,305,686	312,387,590
81	Kunjungan Kerja dalam Daerah	399,970,000	398,120,000	473,387,000	460,086,240	399,440,599	397,653,550	470,748,690	434,638,956
82	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	114,261,200	127,171,000	44,609,800	50,000,000	57,987,000	126,230,291	42,339,400	49,299,456
83	Pelaksanaan Reses	1,507,491,000	1,604,185,000	1,457,148,000	1,196,570,120	1,505,029,900	1,546,287,200	1,438,048,360	1,088,590,500
84	Penyusunan Kode Etik DPRD			25,788,000	29,999,960			18,903,300	27,654,550
85	Pengawasan Kode Etik DPRD	104,521,500	70,346,500	2,256,000	49,999,840	36,575,600	69,982,900	2,256,000	49,377,464
86	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah								
87	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	160,000,000	98,000,000	147,293,700	67,689,960	159,100,000	97,995,400	135,442,000	62,851,350
88	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	326,161,000	241,530,000	600,401,000	950,132,080	325,874,547	241,401,674	599,007,282	949,214,666
89	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			17,212,000				17,212,000	
90	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	252,199,975	313,253,000	223,808,000	174,508,000	250,986,859	313,150,600	220,623,913	173,120,073
91	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				60,000,000				59,990,000



2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang - sebagai penerima layanan utama dalam hal dukungan administratif, fasilitasi, dan teknis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang - dalam bentuk dukungan administrasi dan fasilitasi kepemimpinan dewan.
3. Alat Kelengkapan DPRD - meliputi Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi-komisi, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dalam hal dukungan teknis dan administratif.
4. Fraksi-fraksi di DPRD - dalam bentuk fasilitasi dan dukungan administratif untuk kegiatan fraksi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang - dalam konteks koordinasi dan fasilitasi hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
6. Masyarakat Kabupaten Bengkayang - sebagai fasilitator dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada DPRD dan memberikan informasi mengenai kegiatan DPRD kepada masyarakat.
7. Instansi/lembaga terkait - dalam hal koordinasi dan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.
8. Tenaga ahli/pakar - dalam konteks penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsinya.



2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dan mendukung kelancaran tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat diidentifikasi sebagai berikut: Kurangnya Jumlah ASN dan distribusi yang kurang optimal.

1. Keterbatasan jumlah tenaga administrasi untuk mendukung kegiatan DPRD.
2. Distribusi pegawai yang tidak merata antar bidang/bagian.
3. Kurangnya tenaga ahli di bidang hukum, keuangan, dan teknis legislasi.
4. Tidak adanya tenaga khusus untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD.
5. Beban kerja yang tidak proporsional karena kekurangan personil.
6. Kurangnya Reward dan punishment ASN.
7. Kurangnya pemahaman ASN terhadap perubahan era digitalisasi.

2.5.2 Telaah Renstra K/L

2.5.2.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkayang

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang. Adapun Visi Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 adalah



KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel.
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur.
4. Mewujudkan Perekonomian Yang Kokoh dan Inklusif.
5. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah.

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu memberikan dukungan administratif dan fasilitasi penyelenggaraan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang berkomitmen mendukung Misi ke 2 (dua) yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel.**"

2.5.2.2 Telaahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD memerlukan dokumen perencanaan yang terarah dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama periode lima tahun yang akan menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pelayanan dan fasilitasi kegiatan DPRD.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang dan diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD berkomitmen mendukung Misi ke-2 Kabupaten Bengkayang yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting dan identifikasi isu-isu strategis, Sekretariat DPRD menghadapi beberapa tantangan utama dalam menjalankan fungsinya, antara lain peningkatan kualitas dukungan administratif terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD, serta pengembangan kapasitas SDM dan sarana prasarana penunjang. Untuk merespons tantangan tersebut, Sekretariat DPRD menetapkan visi "Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Mendukung Optimalisasi Fungsi DPRD Kabupaten Bengkayang" yang diwujudkan melalui lima misi strategis beserta program dan kegiatan yang terukur.



Pendanaan untuk implementasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD direncanakan secara indikatif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra akan diukur melalui indikator kinerja yang mencakup aspek pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan DPRD, pengembangan kapasitas SDM, pemenuhan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Melalui perencanaan strategis yang matang ini, diharapkan Sekretariat DPRD dapat memberikan dukungan optimal terhadap DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah.

2.5.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi DPRD terkait dengan pembahasan kebijakan penataan ruang dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD bertugas memfasilitasi DPRD dalam melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bengkayang, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan implementasi kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup. Melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD memberikan dukungan administratif dan teknis kepada DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah terkait penataan ruang serta menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda untuk memastikan bahwa aspek tata ruang dan lingkungan hidup menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bengkayang.



2.5.4 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, penentuan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Isu strategis ini merupakan dinamika permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Peningkatan kualitas dukungan terhadap fungsi legislasi DPRD
2. Optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menunjang prioritas pembangunan daerah
3. Penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD
5. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja DPRD
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD kepada publik

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah



- b. Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Dukungan Anggaran
- d. Sarana Prasarana
- e. Kerjasama dan Koordinasi
- f. Sistem dan Tata Kelola Administrasi
- g. Komitmen dan Integritas Pimpinan

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelayanan kesekretariat DPRD, antara lain adalah :

- a. Tidak semua SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki kemampuan IT.
- b. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kesekretariat yang belum maksimal
- c. Kurangnya Koordinasi antar Bagian



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Tujuan

Penetapan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditentukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan yang ditetapkan akan menjadi dasar dalam perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai langkah untuk merealisasikan Visi dan Misi tersebut.

Tujuan organisasi yang ditetapkan harus dapat mencerminkan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Adapun makna dari penetapan tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi serta perbaikan-perbaikan yang ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- c. Menjadi kerangka prioritas yang memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi, berupa kebijakan, program operasional, serta kegiatan pokok Sekretariat DPRD selama periode Renstra.

Oleh karena itu, tujuan disusun guna memperjelas arah pencapaian sasaran yang ingin diraih. Adapun **tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang**, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif dan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara profesional dan tepat waktu.
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mendukung pelaksanaan tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan DPRD.

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan umum mengenai hasil yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka menengah, sebagai penjabaran lebih lanjut dari **tujuan** yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan kondisi yang lebih spesifik, terukur, dan realistis, yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan organisasi.



Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran langsung dari tujuan organisasi yang menggambarkan capaian yang ingin diraih melalui pelaksanaan kegiatan secara operasional. Sasaran berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terukur, realistis, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan
2. Meningkatnya Nilai SAKIP



Tabel 3.1
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
						2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Fasilitas Kegiatan DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	%	80	83	88	90	90
2.	Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	64	65	66	67	68



2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.2.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/ tantangan, antara lain :

Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya:

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan;
2. Tersedianya jumlah SDM yang memadai.

Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar Perangkat Daerah.

Kelemahan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan diantaranya:

1. Sistem dan prosedur pelayanan belum optimal;
2. Kurangnya SDM yang profesional dan kompeten.

Peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang yaitu:

1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan-perundang-undangan;
2. Adanya keterbukaan informasi publik.



Strategi yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap DPRD, adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkayang
2. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian;
4. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai;
5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja;
6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran;
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

2.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Strategi di atas, adalah :

1. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyusunan produk hukum daerah
2. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.
3. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.
4. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan



dan pelaporan kinerja.

5. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung capaian target strategi yang optimal
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD seperti terlihat pada tabel 3.2 berikut ini:



Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang

Visi : Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkelanjutan			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatkan kualitas fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkayang. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan: • Meningkatkan Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Paripurna; • Rapat Alat-alat Kelengkapan Dewan; • Publik Hearing/ Dialog dengan PD dan Masyarakat; • Pelaksanaan Reses; dan • Dengar Pendapat.



Visi : Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkelanjutan			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP	1. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan penyediaan sarana dan prasarana dalam urusan kepegawaian
		2. Memaksimalkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, langkah-langkah operasional perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan program dan kegiatan tersebut harus mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian, setiap kegiatan merupakan penjabaran langsung dari program yang menjadi arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran yang menunjukkan keberhasilan suatu program atau kegiatan, baik dalam bentuk angka (kuantitatif) maupun deskripsi (kualitatif). Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai, serta sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, mulai dari masukan (input), proses, hasil (output), manfaat (outcome), hingga dampaknya (impact), sesuai dengan sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 2 program, 18 kegiatan dan 91 sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD



- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- j. Layanan Administrasi DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
 - Fasilitasi Fraksi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - Penyusunan Tata Tertib DPRD
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan



Pemeriksa Keuangan

- Pengawasan Penggunaan Anggaran
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

- Orientasi DPRD
- Pendalaman Tugas DPRD
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Penyusunan Program Kerja DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi DPRD

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Kunjungan Kerja dalam Daerah
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Pelaksanaan Reses

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Penyusunan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

h. Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD



Penyusunan program dan kegiatan merupakan bagian dari proses penganggaran dan mencerminkan komitmen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk mencapai target dalam tahun yang ditentukan.

Indikator kinerja adalah ukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang menunjukkan tingkat pencapaian target tersebut. Penetapan indikator ini harus berdasarkan hasil evaluasi, agar memiliki data awal (baseline) yang jelas dan memungkinkan perencanaan capaian yang realistis, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025–2029, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan, lengkap dengan indikator kinerjanya .



Tabel 4.1
Tabel Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Point	11,732,046,330	6100	12,999,671,158	6150	13,563,529,720	62.00	14,210,264,064	62.50	14,842,138,269	63.00	15,478,820,184	
4.02.02.2.01Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			2,593,915,500		2,818,430,200		2,942,076,710		3,147,913,399		3,305,220,068		3,470,631,071	
4.02.02.2.010001Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas oleh DPRD	Dokumen	515,185,500	21	567,500,000	21	596,000,000	21	625,800,000	21	657,000,000	21	690,000,000	
4.02.02.2.010002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah kajian hukum/perundang-undangan yang disusun	Dokumen	1,256,338,000	21	1,383,000,000	21	1,452,150,000	21	1,524,757,500	21	1,600,995,375	21	1,681,045,144	
4.02.02.2.010003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah naskah akademik yang difasilitasi penyusunannya	Dokumen	304,482,000	21	334,930,200	21	351,676,710	21	369,260,546	21	387,723,573	21	407,109,751	
4.02.02.2.010004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah revisi/ penyesuaian Tata Tertib sesuai perkembangan peraturan	Dokumen	150,000,000	1	165,000,000	1	173,250,000	1	181,912,500	1	191,008,125	1	200,558,531	
4.02.02.2.010005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	367,910,000	1	368,000,000	1	369,000,000	1	446,182,853	1	468,492,995	1	491,917,645	
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			1,832,610,624		1,899,444,076		1,938,666,282		1,978,649,597		2,020,482,079		2,064,256,184	
4.02.02.2.02.0001Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	131,087,000	1	144,195,700	1	151,405,485	1	158,975,759	1	166,924,547	1	175,270,775	
4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	179,097,000	1	180,000,000	1	181,000,000	1	182,000,000	1	183,000,000	1	184,000,000	
4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	505,415,000	1	507,000,000	1	509,000,000	1	510,000,000	1	511,000,000	0	512,000,000	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	507,694,920	1	508,000,000	1	509,000,000	1	510,000,000	1	511,000,000	1	512,000,000	
4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	115,567,700	1	127,124,470	1	133,480,694	1	140,154,728	1	147,162,465	1	154,520,588	
4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Dokumen	393,749,000	1	433,123,900	1	454,780,095	1	477,519,100	1	501,395,055	1	526,464,807	
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			1,735,694,604		1,909,264,066		2,004,727,270		2,104,963,637		2,210,211,820		2,320,722,411	
4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Laporan	216,448,040	12	238,092,844	12	249,997,486	12	262,497,361	12	275,622,229	12	289,403,340	
4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan infrastruktur yang diawasi	Laporan	201,402,720	10	221,542,992	12	232,620,142	14	244,251,149	16	256,463,706	18	269,286,891	
4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan kesejahteraan yang diawasi	Laporan	216,448,080	12	238,092,888	12	249,997,532	12	262,497,409	12	275,622,279	12	289,403,393	
4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pengawasan bidang ekonomi	Laporan	204,594,880	12	225,054,368	12	236,307,086	12	248,122,441	12	260,528,563	12	273,554,991	
4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	362,624,000	12	398,886,400	12	418,830,720	12	439,772,256	12	461,760,869	12	484,848,912	
4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rekomendasi DPRD yang disampaikan ke Pemda terkait hasil audit	Dokumen	50,000,000	12	55,000,000	12	57,750,000	12	60,637,500	12	63,669,375	12	66,852,844	
4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen pengawasan penggunaan anggaran	Dokumen	223,547,880	12	245,902,668	12	258,197,801	12	271,107,691	12	284,663,076	12	298,896,230	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	260,629,000	1	286,691,900	1	301,026,495	1	316,077,820	1	331,881,711	1	348,475,796	
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			2,530,839,402		2,817,703,563		2,946,738,742		3,082,575,678		3,224,004,462		3,370,829,686	
4.02.02.2.04.0001Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	344,905,090		0		0		0		0		0	
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1,574,338,040	4	1,731,771,844	6	1,818,360,436	6	1,909,278,458	6	2,004,742,381	6	2,104,979,500	
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar atau tim ahli yang disediakan kepada DPRD	Orang		5	347,726,852	5	365,113,195	6	383,368,854	6	402,537,297	7	422,664,162	
4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli yang disediakan untuk masing-masing fraksi	Orang	219,277,352	6	241,204,867	6	253,265,111	6	265,928,366	6	279,224,784	6	293,186,024	
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	16,204,000	12	100,000,000	12	110,000,000	12	120,000,000	12	130,000,000	12	140,000,000	
4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	59,999,800	1	80,000,000	1	82,000,000	1	85,000,000	1	88,000,000	1	90,000,000	
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	316,115,320	12	317,000,000	12	318,000,000	12	319,000,000	12	319,500,000	12	320,000,000	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,706,656,360				1,813,882,921		1,899,077,067		1,983,280,921		2,073,694,966		2,166,529,715	
4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	460,086,240	12	447,484,295	12	464,858,510	12	483,101,436	12	502,256,507	12	522,369,333	
4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	50,000,000	30	110,000,000	30	115,000,000	30	115,000,000	30	117,000,000	30	117,000,000	
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1,196,570,120	90	1,256,398,626	90	1,319,218,557	90	1,385,179,485	90	1,454,438,459	90	1,527,160,382	
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			79,999,800		83,999,790		88,199,780		92,609,769		97,240,257		102,102,270	
4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD	Dokumen	29,999,960	1	31,499,958	1	33,074,956	1	34,728,704	1	36,465,139	1	38,288,396	
4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pengawasan Kode Etik	Laporan	49,999,840	1	52,499,832	1	55,124,824	1	57,881,065	1	60,775,118	1	63,813,874	
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah			67,689,960		151,074,458		154,628,181		158,359,590		162,277,570		166,391,448	
4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	0	3	80,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	
4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen	67,689,960	12	71,074,458	12	74,628,181	12	78,359,590	12	82,277,570	12	86,391,448	
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			1,184,640,080		1,505,872,084		1,589,415,688		1,661,911,473		1,749,007,047		1,817,357,399	
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan antara DPRD dengan eksekutif dan pihak terkait lainnya	Dokumen	950,132,080	12	997,638,684	12	1,047,520,618	12	1,099,896,649	12	1,154,891,482	12	1,212,636,056	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	0	1	183,233,400	1	192,395,070	1	202,014,824	1	212,115,565	1	222,721,343	
4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	174,508,000	12	175,000,000	12	177,000,000	12	180,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	60,000,000	12	150,000,000	13	172,500,000	14	180,000,000	15	182,000,000	15	182,000,000	
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	%	22,431,755,088	85	26,056,162,041	87	27,150,573,024	90	28,330,706,410	93	29,537,412,319	95	30,376,825,611	
4.02.012.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45,000,000		46,125,000		47,306,250		48,546,564		49,848,891		51,216,336	
4.02.012.010001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	
4.02.012.010002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang disusun sesuai dengan standar yang	Dokumen	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	
4.02.012.010003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disetujui dalam periode anggaran.	Dokumen	7,500,000	1	7,875,000	1	8,268,750	1	8,682,188	1	9,116,297	1	9,572,112	
4.02.012.010004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Dokumen	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	
4.02.012.010005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disetujui sesuai dengan kebijakan.	Dokumen	7,500,000	1	7,875,000	1	8,268,750	1	8,682,188	1	9,116,297	1	9,572,112	



Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.012.010006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7,500,000	1	7,875,000	1	8,268,750	1	8,682,188	1	9,116,297	1	9,572,112	
4.02.012.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,121,578,874		3,277,657,818		3,441,540,709		3,613,617,745		3,794,298,632		3,984,013,562	
4.02.012.02.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	3,076,578,874	30	3,230,407,818	30	3,391,928,209	30	3,561,524,619	30	3,739,600,850	30	3,926,580,892	
4.02.012.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Dokumen	7,500,000	12	7,875,000	12	8,268,750	12	8,682,188	12	9,116,297	12	9,572,112	
4.02.012.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Laporan	15,000,000	1	15,750,000	1	16,537,500	1	17,364,375	1	18,232,594	1	19,144,223	
4.02.012.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	7,500,000	1	7,875,000	1	8,268,750	1	8,682,188	1	9,116,297	1	9,572,112	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.012.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD	Laporan	15,000,000	2	15,750,000	2	16,537,500	2	17,364,375	2	18,232,594	2	19,144,223	
4.02.012.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			29,999,500		31,499,475		33,074,449		34,728,173		36,464,580		38,287,810	
4.02.012.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	7,500,000	1	7,875,000	1	8,268,750	1	8,682,188	1	9,116,297	1	9,572,112	
4.02.012.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	7,500,000	1	7,875,000	1	8,268,750	1	8,682,188	1	9,116,297	1	9,572,112	
4.02.012.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	7,499,500	1	7,874,475	1	8,268,199	1	8,681,609	1	9,115,689	1	9,571,474	
4.02.012.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7,500,000	1	7,875,000	1	8,268,750	1	8,682,188	1	9,116,297	1	9,572,112	
4.02.012.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			127,031,145		445,531,145		455,531,145		465,531,145		475,531,145		485,531,145	
4.02.012.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	73,031,145	90	73,031,145	90	73,031,145	90	73,031,145	90	73031145	90	73031145	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.012.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihana	Orang	54,000,000	28	200,000,000	30	210,000,000	31	220,000,000	32	230,000,000	33	240,000,000	
4.02.012.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	50	172,500,000	50	172,500,000	50	172,500,000	50	172,500,000	50	172,500,000	
4.02.012.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,046,503,340		1,677,261,913		1,697,048,998		1,724,326,447		1,749,117,771		1,774,948,658	
4.02.012.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	38,000,000	12	39,900,000	12	41,895,000	12	43,989,750	12	46,189,238	12	48,498,699	
4.02.012.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100,568,000	12	105,596,400	12	110,876,220	12	116,420,031	12	122,241,033	12	128,353,084	
4.02.012.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	12	496,500,963	12	497,000,000	12	498,000,000	12	499,000,000	12	499,500,000	
4.02.012.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan	Paket	472,858,060	12	473,000,000	12	473,500,000	12	474,000,000	12	474,500,000	12	475,000,000	
4.02.012.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	59,566,000	12	61,000,000	12	62,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	12	80,000,000	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.012.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	15,000,280	12	50,264,550	12	52,777,778	12	55,416,666	12	58,187,500	12	61,096,875	
4.02.012.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	47,871,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	
4.02.012.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	24,065,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	
4.02.012.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Laporan	249,915,000	12	260,000,000	12	265,000,000	12	270,000,000	12	275,000,000	12	280,000,000	
4.02.012.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3,860,000	1	5,000,000	1	6,000,000	1	6,500,000	1	7,000,000	1	7,500,000	
4.02.012.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	34,800,000	3	36,000,000	3	38,000,000	3	40,000,000	3	42,000,000	3	45,000,000	
4.02.012.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			124,279,800		1,441,181,290		1,377,500,000		1,352,431,290		1,302,500,000		1,252,431,290	
4.02.012.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
4.02.012.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	1	520,000,000	1	520,000,000	1	520,000,000	1	520,000,000	1	520,000,000	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.012.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	unit	0	3	86,250,000	3	86,250,000	3	86,250,000	3	86,250,000	3	86,250,000	
4.02.012.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	3	28,750,000	3	28,750,000	3	28,750,000	3	28,750,000	3	28,750,000	
4.02.012.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	0	1	650,000,000	1	575,000,000	1	550,000,000	1	500,000,000	1	450,000,000	
4.02.012.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	99,229,800	1	69,931,290	1	70,000,000	1	69,931,290	1	70,000,000		69,931,290	
4.02.012.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	25,050,000	1	86,250,000	1	97,500,000	1	97,500,000	1	97,500,000	1	97,500,000	
4.02.012.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			995,432,688		1,160,954,322		1,219,452,038		1,279,824,640		1,343,215,872		1,409,776,667	
4.02.012.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5,000,000	12	11,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	
4.02.012.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	287,200,000	12	301,560,000	12	316,638,000	12	332,469,900	12	349,093,395	12	366,548,065	
4.02.012.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	12	110,000,000	12	115,500,000	12	121,275,000	12	127,338,750	12	133,705,688	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.012.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	703,232,688	12	738,394,322	12	775,314,038	12	814,079,740	12	854,783,727	12	897,522,914	
4.02.012.09.0001 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			763,789,900		918,772,245		972,023,358		1,027,999,525		1,083,549,502		663,839,921	
4.02.012.09.0001.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	373,300,900	19	391,965,945	19	411,564,242	19	432,142,454	19	453,749,577	19	476,437,056	
4.02.012.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	201,281,400	19	211,345,470	19	221,912,744	19	233,008,381	19	244,658,800	19	256,891,740	
4.02.012.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	unit	0	50	28,750,000	50	32,500,000	50	37,000,000	50	39,000,000	50	40,000,000	
4.02.012.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	80,720,000	6	84,756,000	6	88,993,800	6	93,443,490	6	98,115,665	6	103,021,448	
4.02.012.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	49,483,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	
4.02.012.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	0	4	40,000,000	4	42,000,000	4	44,100,000	4	46,305,000	4	48,620,250	
4.02.012.09.0011.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	59,004,600	4	61,954,830	4	65,052,572	4	68,305,200	4	71,720,460	4	75,306,483	
4.02.012.15.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			15,367,660,841		16,136,043,883		16,942,846,077		17,789,988,381		18,679,487,801		19,613,462,190	
4.02.012.15.0001.Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	14,775,870,261	30	15,514,663,774	30	16,290,396,963	30	17,104,916,811	30	17,960,162,652	30	18,858,170,784	



**Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.012.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket	403,000,000	3	423,150,000	3	444,307,500	3	466,522,875	3	489,849,019	3	514,341,470	
4.02.012.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	188,790,580	30	198,230,109	30	208,141,614	30	218,548,695	30	229,476,130	30	240,949,936	
4.02.012.16 Layanan Administrasi DPRD			810,479,000		921,134,950		964,250,000		993,712,500		1,023,398,125		1,103,318,032	
4.02.012.16.0001Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	0	30	30,000,000	30	31500,000	30	33,075,000	30	34,728,750	30	36,465,188	
4.02.012.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	0	6	55,000,000	6	57,750,000	6	60,637,500	6	63,669,375	6	66,852,844	
4.02.012.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	396,319,000	44	416,134,950	44	450,000,000	44	470,000,000	44	490,000,000	44	550,000,000	
4.02.012.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	414,160,000	12	420,000,000	12	425,000,000	12	430,000,000	12	435,000,000	12	450,000,000	
JUM LAH			34,163,801,450		39,055,833,247		40,714,102,808		42,540,970,554		44,379,550,684		45,855,645,907	



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penentuan target keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) yang juga memiliki keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas kinerja dan pencapaian program-program yang telah ditetapkan.

Berikut data tabel IKU Sekretariat DPRD sebagai indikator capaian kinerja yang akan menjadi acuan evaluasi dan pengukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkayang selama periode perencanaan lima tahun ke depan.



Tabel 4.2
Tabel Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	%	80	83	85	87	90	93	95	95
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	60.75	60.85	61.00	61.50	62.00	62.50	63.00	63.00



4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penetapan target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk periode tahun 2025-2029, yang secara khusus diperuntukkan bagi perangkat daerah pemangku urusan pemerintahan daerah. Penentuan target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi perangkat daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai perangkat daerah pemangku urusan kesekretariatan legislatif memiliki Indikator Kunci Daerah (IKD) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terkait Urusan Kesekretariatan DPRD sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menunjang Indikator Kunci Daerah (IKD) Kabupaten Bengkayang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Tabel 4.3
Tabel Indikator Kinerja Kunci
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Ketetapan Penetapan Perda APBD	%	70	80	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan Ranperda	%	80	85	88	90	93	95	98	98
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	80	83	86	89	92	95	98	98
4	Nilai SAKIP	Nilai	60.75	61.00	61.50	63.75	62.00	62.50	63.00	63.00



BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan implementasinya bergantung pada dukungan seluruh aparatur serta komitmen ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Dokumen ini berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan dan memperkuat peran stakeholders dalam pelaksanaan program Sekretariat DPRD. Renstra juga menjadi landasan penting untuk Evaluasi dan Laporan Kinerja Tahunan, yang memastikan akuntabilitas dan pengukuran pencapaian.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang 2025-2029, diharapkan seluruh jajaran terdorong untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kegiatan secara efektif di tahun-tahun mendatang, sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak terkait.

Bengkayang, Juni 2025
Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang,

DODORIKUS, AP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741011 199412 1 001